

STRATEGI PENGELOLAAN PIUTANG: ANALISIS PROSEDUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Rahmi Nadiar^{1*}, Rahmatullah Alfikri², Ros Nirwana³

Politeknik Negeri Tanah Laut^{1,2}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia³

e-mail: rahmi@politala.ac.id

Abstract: This study examines the accounts receivable management strategy at XYZ Public Corporation, focusing on accounting procedures and their impact on financial performance. The primary objective of the research is to analyze accounts receivable management and write-offs for uncollectible receivables. The method employed is descriptive analysis with qualitative data. The population of this study is all of the account receivable of the public corporation, while the sample is the account receivable from year 2012 to 2017. The findings indicate challenges in receivable collections, which have led to an increase in uncollectible receivables, negatively affecting the company's operating profit. The unstandardized write-off policy has also contributed to the high value of receivables on the balance sheet. This study provides recommendations for implementing improved accounts receivable management procedures and enhancing accounting policies to improve the financial performance of XYZ Public Corporation.

Keywords: accounts receivable management, accounting procedures, financial performance, uncollectible receivables

Abstrak: Penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan piutang di Perumda XYZ dengan fokus pada prosedur akuntansi dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan piutang dan penghapusan piutang tak tertagih. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif. Piutang Perumda XYZ merupakan populasi, sedangkan sampelnya yaitu piutang selama 7 tahun dari tahun 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam penagihan piutang yang menyebabkan peningkatan jumlah piutang tak tertagih, yang berdampak negatif terhadap laba operasional perusahaan. Kebijakan penghapusan piutang yang tidak terstandarisasi juga berkontribusi pada tingginya nilai piutang di neraca. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penerapan prosedur pengelolaan piutang yang lebih baik dan perbaikan dalam kebijakan akuntansi guna meningkatkan kinerja keuangan Perumda XYZ.

Kata kunci: pengelolaan piutang, prosedur akuntansi, kinerja keuangan, piutang tak tertagih

Latar Belakang

Secara umum, dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama sebuah Perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan (berorientasi pada profit), mempertahankan eksistensi Perusahaan, serta menjamin kelangsungan operasional agar dapat

tumbuh menjadi entitas yang besar dan kuat. Keberhasilan dan kelangsungan perusahaan sangat bergantung pada manajemen yang efektif, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Meskipun proses pemberian kredit telah banyak diteliti, tidak ada perusahaan yang dapat

sepenuhnya menghindari kemungkinan debitur gagal membayar sebagian dari piutang yang ada.

Dalam praktiknya, risiko piutang yang tidak tertagih memang selalu ada, agar dapat mencegah penumpukan modal kerja akibat piutang, Perusahaan membutuhkan system akuntansi yang terpercaya dalam mencatat dan mengelola piutang. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti pengakuan, penilaian, penyisihan, dan amortisasi piutang, yang kesemuanya harus diterapkan dengan tepat.

Kerugian piutang merujuk pada kerugian yang timbul akibat piutang yang tidak dapat tertagih. Dampak dari kerugian piutang dapat sangat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Semakin besar penyisihan kerugian piutang yang dilakukan, maka semakin kecil pula laba operasional yang tercatat, meskipun perusahaan pada umumnya berusaha untuk mencapai laba yang maksimal. Laba yang tinggi memberikan manfaat yang besar bagi pemegang saham, karyawan, dan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengelolaan piutang dan analisis piutang yang diterapkan oleh perumda XYZ mencakup seluruh tahapan, mulai dari penjualan secara kredit, pencatatan akuntansi piutang, hingga tahap penyisihan dan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Analisis Piutang pada Perumda XYZ”

Studi Literatur Akuntansi

Akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan operasional sebuah Perusahaan. Ketika diterapkan dengan tepat, akuntansi memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih terarah dan rasional, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Akuntansi sering kali dianggap sebagai bahasa dunia bisnis atau sebagai alat dalam pengambilan keputusan keuangan (Purwanti et al., 2024). Hal ini terjadi karena akuntansi berperan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk perencanaan keuangan, pengajuan

pinjaman, investasi, pembayaran pajak penghasilan, serta berbagai hal lainnya.

Peran akuntansi sebagai system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengorganisir data menjadi laporan, dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Proses akuntansi dimulai dengan mencatat dan mengklasifikasikan transaksi serta data lain ke dalam laporan keuangan, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk pengambilan Keputusan dan evaluasi kinerja bisnis berdasarkan laporan tersebut. (Horngren & Harrison, 2017).

Piutang

Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan tentunya harus mampu menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya, akan menentukan laba atau rugi yang berdampak pada total kekayaan Perusahaan. Aktivitas utama dalam Perusahaan jasa atau komersial umumnya melibatkan penjualan produk atau layanan, baik tunai dengan pembayaran dilakukan secara langsung atau kredit yang menimbulkan piutang. (Baridwan, 2004), yaitu:

1. Pembeli memerlukan barang dan layanan secara langsung, tetapi sering kali mereka tidak dapat melakukan pembayaran langsung atau memilih untuk menggunakan metode pembayaran seperti kredit atau cicilan.
2. Penjual berpeluang untuk meningkatkan volume penjualannya dengan menawarkan sistem pembayaran kredit dibandingkan hanya mengandalkan pembayaran tunai.

Ketika suatu transaksi dilakukan dengan cara kredit, hal ini akan menciptakan piutang (*account receivable*). Banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan penjualan kredit sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan barang atau jasa mereka. Piutang mencakup klaim finansial terhadap pihak lain, seperti individu, perusahaan, dan organisasi lainnya (Demak et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang melibatkan segala bentuk klaim kepada

konsumen, seperti barang, jasa, dan uang yang timbul dari berbagai jenis transaksi. Penjualan kredit memberikan hak bagi perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam transaksi tersebut.

Akuntansi Piutang Usaha

Akuntansi piutang usaha mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Setiap transaksi harus dicatat secara rinci untuk mencerminkan perubahan pada piutang perusahaan terhadap debitur yang bersangkutan. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya penjualan kredit, dan apabila piutang tidak dapat tertagih, kerugian tersebut akan dicatat sebagai kerugian pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang akurat melalui ayat jurnal untuk mengurangi nilai piutang usaha serta dampaknya terhadap laba perusahaan. Piutang yang sudah dianggap tidak tertagih tidak lagi dicatat sebagai aset dan harus dihapus dari daftar piutang yang terdapat dalam neraca

Piutang yang tidak dapat ditagih harus dicatat menjadi beban dan ditetapkan kerugian, sehingga terlihat dalam laporan laba rugi. Setiap penghapusan piutang tidak tertagih harus dilaksanakan dengan cermat serta pencatatan yang akurat, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan Keputusan.

Ada tiga metode untuk perkiraan total Cadangan penghapusan piutang, yaitu:

1. Melalui analisis umur piutang (*aging schedule*)
2. Memperkirakan saldo akhir piutang yang akan muncul di neraca
3. Memperkirakan jumlah yang terjadi selama satu periode.

Cara menangani piutang yang dianggap tidak dapat ditagih, dengan metode penyisihan mencatatkan beban untuk perkiraan piutang yang tidak dapat ditagih sebelum penghapusan piutang (Warren et al., 2005). Sementara itu, metode penghapusan langsung hanya mencatatkan beban ketika piutang tersebut sudah dipastikan tidak bernilai lagi (Gabriel, 2023).

Setiap transaksi perlu didukung oleh bukti atau dokumen yang sah sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Semua transaksi ini dijurnalkan sebagai berikut:

a. Penjualan Kredit		
dt Piutang Usaha	xxx	
ct Penjualan Pendapatan		xxx
b. Retur Penjualan		
dt Retur Penjualan	xxx	
ct Piutang Usaha		xxx
c. Penerimaan Kas		
dt Kas	xxx	
ct Piutang Usaha		xxx
d. Penghapusan Piutang		
dt Cad. Kerugian Piutang	xxx	
ct Piutang Usaha		xxx

Perusahaan sering kali memberikan diskon dalam transaksi penjualan secara kredit, yang dapat berupa diskon penjualan atau diskon dagang. Diskon dagang biasanya dihitung sebagai persentase, sedangkan diskon penjualan biasanya ditulis dalam format seperti 2/10, n/30 yang berarti diskon dua persen dapat diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu sepuluh hari dan pembayaran penuh harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari.

Penilaian piutang usaha lebih sulit karena jumlah piutang yang tercatat dalam neraca harus menunjukkan nilai bersih yang diperkirakan dapat diterima dalam bentuk kas. Perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih serta potongan penjualan untuk menghitung nilai realisasi bersih. Perusahaan harus menghitung jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih serta retur dan potongan penjualan.

Perlakuan Akuntansi Piutang Tidak Tertagih

Dua metode akuntansi berbeda digunakan untuk mencatat piutang tidak tertagih, yaitu:

1. Metode Penghapusan Langsung

Metode ini dipilih karena piutang Perusahaan tidak dapat ditagih dan kehilangan nilainya. Jika jelas bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan, debitur dianggap tidak tertagih. Kelemahan metodenya adalah nilai piutang yang tercatat tidak

mencerminkan jumlah yang dapat dipulihkan, sehingga menyulitkan perbandingan antara pendapatan dan beban pada periode-periode yang berbeda. Ayat jurnal yang digunakan untuk menghapus piutang tak tertagih adalah:

a. Penghapusan piutang tak tertagih		
dt Beban Piutang	xxx	
Tak Tertagih		
ct Piutang		xxx
b. Penerbitan kembali piutang yang sudah dihapuskan		
dt Piutang	xxx	
ct Beban Piutang		xxx
Tak Tertagih		
c. Penerimaan kas		
dt Kas	xxx	
ct Piutang		xxx

2. Metode Penyisihan

Pengestimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih, Perusahaan biasanya menggunakan metode penyisihan. Metode ini menghitung beban perkiraan yang dibuat selama periode akuntansi saat penjualan kredit dilakukan. Agar mencocokkan antara beban dan pendapatan dengan tepat, piutang yang tidak dapat ditagih yang dilaporkan pada periode yang sama dengan penjualannya. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa nilai piutang yang tercatat dalam neraca mencerminkan jumlah yang dapat direalisasikan. Penjurnalan dengan metode ini, yaitu:

a. Pembentukan cadangan		
dt Beban Piutang	xxx	
Tidak Tertagih		
ct Cadangan		xxx
Piutang Tidak Tertagih		
b. Penghapusan piutang tidak tertagih		
dt Cadangan	xxx	
Piutang Tidak Tertagih		
ct Piutang		xxx
c. Penerbitan Piutang Tidak tertagih yang telah dihapuskan		
dt Piutang	xxx	
ct Cadangan		xxx
Piutang Tidak Tertagih		
d. Untuk mencatat penerimaan kas		
dt Kas	xxx	
ct Piutang		xxx

Estimasi piutang yang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal:

1. Jumlah penjualan yang menghasilkan piutang sebagai hasil dari penjualan kredit. Suatu perusahaan dapat memperkirakan piutang tak tertagih dengan persentase tertentu berdasarkan total penjualan pada periode tertentu.
2. Jumlah utang Perusahaan mengevaluasi durasi piutang. Untuk itu perusahaan membuat rencana jatuh tempo piutang (*aging plan*) yang menunjukkan jumlah piutang dan jumlah tahun yang telah berlalu.

Piutang harus dicatat sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan perkiraan piutang yang tidak tertagih. Total piutang harus dilaporkan dalam neraca bersama dengan menggunakan penyisihan piutang untuk menghitung jumlah yang tidak dapat ditagih (IAI, 2009). PSAK No. 9 pencatatan klaim, sebagai berikut:

a. Pengakuan kerugian piutang		
dt Kerugian piutang	xxx	
ct Cadangan kerugian		xxx
b. Penghapusan piutang		
dt Cadangan kerugian	xxx	
ct Piutang		xxx

Kerugian piutang diakui pada akhir periode, sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih akan tercatat, dengan dukungan data yang akurat dari departemen akuntansi. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pendapatan bersih perusahaan pada periode tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan kerugian piutang yang tidak tertagih sebagai pendapatan lain-lain jika pembayaran diterima dari pelanggan yang piutangnya telah dihapuskan pada periode berikutnya. Namun, jika penerimaan terjadi pada periode yang sama dengan penghapusan piutang, maka jumlah tersebut akan digunakan untuk mengurangi biaya kerugian piutang.

Piutang Daerah

Piutang daerah adalah jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah atau asset yang dapat dinilai dengan uang yang dihasilkan dari perjanjian atau keadaan lain yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Piutang daerah sangat penting untuk pelaporan di neraca karena memiliki

kemampuan untuk meningkatkan asset lancar dan memiliki hal untuk menagih dan mencatatnya.

Piutang daerah biasanya berasal dari tunggakan pendapatan, pinjaman, atau transaksi lainnya yang menyebabkan hak tagih dalam melakukan tugas pemerintah. Piutang daerah dibagi menjadi tiga jenis berikut berdasarkan cara dikumpulkan

1. Piutang pajak daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan pajak yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan atau Perda dan belum dibayar oleh WP sampai periode berakhir. Pajak daerah berlaku untuk Pemprov, Kabupaten, dan Kota.
2. Piutang retribusi adalah piutang yang berasal dari izin atau layanan yang diberikan oleh Pemda kepada seseorang atau badan. Jenis retribusi ini terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu menurut peraturan pajak dan retribusi daerah. Apabila tagihan retribusi belum dibayar oleh WP hingga jatuh tempo maka akan dicatat sebagai piutang.

Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya termasuk potensi PAD dari pengelolaan kekayaan yang terppisah, seperti bagian laba dari BUMD dan sumber PAD lainnya, seperti bunga penjualan asset yang tidak dikelola terpisah, tuntutan ganti rugi, dendam dan penggunaan asset atau layanan oleh pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Data adalah informasi yang diperoleh dari penelitian atau referensi, yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mencari alternatif yang tepat. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data piutang

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari Perumda XYZ seperti data piutang dan peraturan yang terkait dengan instansi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif, yang bertujuan mengidentifikasi masalah dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan membandingkan data atau kondisi yang ada. Metode

ini berfungsi untuk menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian untuk membuat suatu kesimpulan. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan objek penelitian berdasarkan data yang diterima, tanpa menggunakan analisis yang mendalam atau pembuatan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada isu-isu yang ada selama proses penelitian, dan hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Proses analisis data terkait piutang pada Perusahaan, seperti penyisihan dan penghapusan piutang yang tidak tertagih dengan Langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang relevan mengenai piutang yang tercatat.
2. Menilai total piutang dan menentukan jumlah menurut umur piutang berdasarkan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih.
3. Menganalisis dan mengevaluasi piutang serta dampak kerugian yang timbul akibat piutang yang tidak dapat ditagih.
4. Menurut penganalisis Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan ditarik dan rekomendasi yang diperlukan diberikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian Timbulnya Piutang

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Perumda XYZ adalah proses bisnis yang menghasilkan hak dalam bentuk piutang daerah. Piutang usaha umumnya menjadi bagian terbesar dari aset lancar dan merupakan komponen utama dalam total aset perusahaan. Piutang mencakup semua kewajiban yang harus dibayar oleh individu, badan usaha, atau pihak lain. Sebagai elemen penting dalam perusahaan, piutang merupakan aset lancar yang dapat dicairkan dan terus aktif. Namun, sering kali penagihan piutang tidak dilakukan tepat waktu, meskipun perusahaan memerlukan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kecepatan konversi piutang menjadi kas sangat bergantung pada kebijakan perusahaan yang mengatur perputaran piutang.

Piutang daerah biasanya timbul akibat tidak dibayarnya penerimaan pendapatan, pemberian pinjaman, dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak penagihan terkait kegiatan pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan data piutang Usaha bruto Perumda XYZ, terdapat peningkatan setiap tahunnya, dari Rp. 3.920.465.298 pada tahun 2021 menjadi Rp. 4.083.114.412. Piutang ini berasal dari berbagai sektor, seperti jasa pelayanan fasilitas harian umum, jasa pelayanan fasilitas, reklame, balik nama, administrasi, dan operasional lainnya, yang berasal dari pengguna layanan yang belum membayar jasa pelayanan yang diberikan.

Kebijakan Cadangan Piutang Tak Tertagih

Piutang dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan dengan cara membentuk cadangan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Pembentukan cadangan piutang tidak dapat ditagih di Perumda XYZ mengacu pada Keputusan Direksi Perumda XYZ yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Kebijakan klasifikasi untuk pembentukan cadangan piutang tak tertagih dibagi menjadi dua kategori dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Piutang Sewa Toko, Bak dan SIPTU

Tahun	Persentase (%)
2010	50
2011	40
2012	15
2013	10
2014	6
2015	5
2016	4
2017	3
2018	2
2019	1
2020	0,30
2021	0,20

Tabel 2. Piutang Kontrak Pihak Ketiga

Tahun	Persentase (%)
2010	100
2011	50
2012	15
2013	10
2014	7
2015	3
2016	2
2017	1
2018	0,30
2019	0,25
2020	0,20
2021	0,15

Pasal 6 dan 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 bahwa penentuan besaran penyisihan piutang tidak dapat ditagih (Permendagri, 2015) pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Kategori lancar berdasarkan Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan.
2. Kualitas kurang lancar berdasarkan umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.
3. Kualitas diragukan berdasarkan umur piutang 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Kualitas macet berdasarkan umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen).

Terdapat perbedaan dalam prosedur pencatatan kebijakan terkait piutang tak tertagih antara Keputusan Direksi Perumda XYZ dan Pasal 6 serta 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2015. Perbedaan ini menyebabkan nilai piutang yang tercatat di neraca menjadi tinggi, karena adanya perbedaan dalam persentase penyisihan piutang. Selain itu, kebijakan Direksi Perumda XYZ tidak mempertimbangkan kualitas piutang dalam proses pengelompokan kategori penyisihan piutang.

Pengakuan dan Penyajian Piutang

Pengungkapan dan penyajian piutang dalam laporan keuangan harus mencakup semua jenis piutang utama yang ada dalam neraca. Piutang jangka pendek tercatat sebagai aset lancar, dan ditempatkan pada kategori investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek disajikan terlebih dahulu karena memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi (lebih cepat dicairkan), sementara jumlah piutang bruto dan cadangan untuk piutang yang tidak dapat ditagih harus dilaporkan secara bersamaan.

Penilaian piutang harus ditampilkan dalam bentuk kas dengan nilai yang direalisasikan pada laporan keuangan. Untuk piutang usaha, ketentuan ini mengharuskan pembuatan cadangan untuk piutang yang berisiko tidak dapat ditagih dengan nilai yang ditetapkan. Untuk menghitung jumlah

cadangan tersebut setiap akhir tahun, perlu pengelolaan.

Pada laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah XYZ, piutang usaha disajikan dengan mengurangi penyisihan piutang dari piutang bruto untuk memperoleh nilai bersih. Sebaiknya, dalam pencatatan piutang, yang dicatat hanya nilai bersihnya, sedangkan penyisihan piutang dapat disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), sehingga jumlah piutang yang tercatat di neraca tidak terlalu besar.

Prosedur Penghapusan Piutang

Wajib Retribusi yang dapat dihapuskan diidentifikasi dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Wajib Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
2. Wajib Retribusi yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan atau ahli waris.
3. Wajib Retribusi yang tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan.
4. Wajib Retribusi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dengan hasil likuidasi aset yang tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi.
5. Wajib Retribusi terkena hukuman pidana berdasarkan putusan hukum yang sah dari pihak yang berwenang.
6. Wajib Retribusi yang terdampak oleh bencana alam yang tak terhindarkan, dengan bukti kejadian yang sah dan didukung oleh otoritas terkait.
7. Hak untuk menagih piutang Retribusi telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
8. Dokumen yang mendukung penagihan piutang Retribusi hilang akibat keadaan *force majeure*.
9. Hak PD untuk menagih piutang Retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor tertentu, termasuk perubahan kebijakan atau keputusan dari Dewan Pengawas.
10. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan karena:
 - a. Wajib Retribusi telah pindah alamat dan tidak dapat dilacak; atau
 - b. Wajib Retribusi telah meninggalkan Indonesia secara permanen.

Prosedur penghapusan piutang retribusi, sebagai berikut:

1. Direktur Keuangan atau yang membidangi piutang retribusi untuk penyampaian daftar usulan penghapusan piutang retribusi terhadap Direktur setiap tahun.
2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama Subjek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi
 - b. Alamat Objek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi
 - c. Nomor Objek Retribusi (NOR)
 - d. Tahun retribusi
 - e. Jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan
 - f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan
 - g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
3. Dewan Pengawas melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
4. Dewan Pengawas menyetujui Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
5. Penghapusan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi oleh bidang akuntansi.

Prosedur Akuntansi Penyelesaian Piutang Macet

Setelah prosedur penagihan dan evaluasi terhadap piutang macet dilakukan, untuk mengurangi jumlah piutang yang tercatat, dapat dilakukan penghapusan piutang secara mutlak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Peraturan Pemerintah, 2017), dijelaskan bahwa piutang yang dihapuskan pada Perusahaan Negara/Daerah dapat dilakukan baik secara bersyarat maupun

mutlak berdasarkan aturan yang ditetapkan. Penghapusan piutang pada BUMD tidak dapat diperlakukan sama dengan penghapusan piutang daerah. Piutang macet yang dimiliki oleh BUMD tidak lagi menjadi tanggung jawab PUPN, sebagaimana diatur dalam UU PUPN, melainkan harus mengikuti mekanisme korporasi yang berlaku umum. Dengan demikian, penghapusan piutang pada BUMD bukan lagi menjadi tanggung jawab PUPN, dan penyelesaian piutang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme korporasi. Hal ini mengharuskan adanya daftar nominatif piutang yang telah mendapat persetujuan dari dewan pengawas dan dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Piutang retribusi dikategorikan macet dapat diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapuskan
2. Berdasarkan laporan dari bagian penagihan piutang, bahwa wajib retribusi benar-benar dikategorikan wajib retribusi yang termasuk dapat dihapus

Jika terdapat pembayaran retribusi dari wajib retribusi yang sudah dihapuskan, maka jika terjadi pembayaran ditetapkan menjadi pendapatan lain-lain pada tahun berjalan.

Pembahasan

Studi sebelumnya oleh Pramesti mengenai analisis piutang usaha di PDAM Tirta Hita Buleleng menemukan bahwa pengakuan, penerimaan, penyisihan, dan penghapusan piutang sudah sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun tingkat pengumpulan piutang tercatat dalam 36 hari, ini masih melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan selama 20 hari, yang menandakan bahwa proses pengumpulan piutang ini belum optimal. Di samping itu, PDAM Tirta Hita Buleleng juga melakukan penyisihan piutang yang tidak dapat untuk piutang yang sudah berumur lebih dari tiga tahun. Apabila piutang tersebut tidak dapat ditagih setelah periode tiga tahun, maka piutang tersebut akan dihapus untuk memperbaiki kualitas kinerja keuangan (Pramesti et al., 2024).

Hal serupa juga terjadi di Perumda XYZ, yang melakukan penghapusan piutang karena tingkat pengumpulan piutang yang mencapai 136 hari, lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 hari. Lamanya waktu pengumpulan piutang ini disebabkan oleh banyaknya penyewa yang sudah tidak dapat ditemukan, maka penagihan piutang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penghapusan piutang layak untuk dihapus.

Analisis Tingkat Perputaran Piutang Usaha

Dalam penelitian yang dilakukan pada Perumda XYZ mengenai pengelolaan dan pencatatan akuntansi piutang usaha, ditemukan bahwa banyaknya piutang yang tidak tertagih disebabkan oleh kebijakan Direksi Perumda XYZ mengenai cadangan kerugian piutang yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Permendagri No. 73 Tahun 2015. Akibatnya, jumlah piutang yang tercatat di neraca menjadi semakin besar. Selain itu, penyajian piutang pada neraca seharusnya hanya mencantumkan piutang bersih.

Perumda XYZ juga tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerimaan kas, seperti kewajiban untuk membayar sewa retribusi pasar sebelum menggunakan los pasar. Hal ini menyebabkan apabila penyewa tidak dapat membayar, mereka dapat meninggalkan pasar, sementara retribusi yang belum dibayar menambah jumlah piutang. Selain itu, belum ditemukan data mengenai penagihan kepada wajib retribusi atau catatan penghapusan piutang, terutama yang tergolong sebagai piutang macet.

Analisis Periode Pengumpulan Piutang (Collection Period)

Periode pengumpulan piutang merujuk pada waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Periode ini menggambarkan berapa lama perusahaan membutuhkan waktu untuk melakukan penagihan terhadap piutangnya. Semakin pendek periode tersebut, semakin baik kinerja perusahaan. Umumnya, periode pengumpulan dihitung dengan

membagi total piutang dengan rata-rata penjualan harian, meskipun beberapa perusahaan juga menggunakan rata-rata piutang kredit untuk perhitungan tersebut.

$$\text{Periode pengumpulan piutang} = \frac{\text{Piutang} \times 360}{\text{Penjualan kredit}}$$

Jika periode pengumpulan piutang terlalu lama, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kredit yang diterapkan perusahaan cenderung longgar, yang dapat menyebabkan peningkatan piutang tak tertagih dan membengkaknya investasi dalam piutang, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, jika periode pengumpulan terlalu singkat, maka kebijakan kredit perusahaan bisa terlalu ketat, yang dapat berisiko kehilangan peluang pendapatan. Perhitungan Periode Pengumpulan Piutang (*Collection Period*) biasanya mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002.

$$\text{Collection period} = \frac{\text{Piutang usaha (rata - rata)}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365$$

Definisi:

- Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Dari hasil perhitungan bahwa piutang wajib retribusi rasio pengumpulannya selama 135,69/136 hari, yang merupakan jangka waktu yang lama agar piutang menjadi kas, Perumda XYZ harus mempercepat penagihan piutang dikarenakan semakin cepat waktu pengembalian piutang, maka akan semakin bagus bagi perusahaan. Selain itu diharapkan Perumda XYZ dapat melakukan upaya penghapusan piutang retribusi dengan menetapkan kriteria wajib retribusi yang “layak” untuk dihapus.

Perlakuan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih

Jika terdapat penghapusan piutang retribusi dengan adanya dokumen surat keputusan direksi tentang penghapusan

piutang retribusi dan persetujuan dewan pengawas dengan pencatatan, sebagai berikut:

- a. Jurnal Umum

dt Akumulasi	xxx	
Penyusunan Kerugian Piutang Retribusi		
ct Piutang Retribusi		xxx
- b. Jurnal Penerimaan Kas

dt Kas	xxx	
ct Pendapatan lain-lain		xxx

Jika ditinjau dari daftar sisa saldo piutang yang yang masuk kriteria macet dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Daftar Sisa Saldo Piutang

Tahun	Nilai (Rp)
2012	31.082.311
2013	58.917.761
2014 (A)	40.138.899
2014 (B)	28.131.980
2015 (A)	19.474.620
2015 (B)	28.007.651
2016	105.572.182
2017	125.715.490
Total	427.040.894

Sumber: Laporan Piutang Perumda XYZ (2024)

Total piutang yang dikategorikan macet sebesar Rp 427.040.894 atau sebesar 10,7% dari total piutang (Rp 4.083.114.412). Nilai piutang macet tersebut “LAYAK” untuk dihapus dengan ketentuan dikategorikan piutang retribusi yang dapat dihapus. Hal ini dikarenakan piutang yang tidak dapat ditagih serta dikategorikan layak dihapus akan dicatat sebagai beban. Semakin besar beban maka semakin besar nilai pengurang pendapatan yang mengakibatkan semakin kecil pula laba yang dihasilkan.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Hasil analisis dan penelusuran terhadap Perumda XYZ khususnya pada wajib retribusi masih banyak yang tidak membayar di awal, sehingga terdapat piutang.
2. Terdapat perbedaan tata cara pencatatan kebijakan dangan piutang tak tertagih dari dengan Keputusan Direksi Perumda XYZ Nomor: KD135/PD.PBB/2022 dan Pasal 6 dan 7 Permendagri Nomor 73

Tahun 2015, hal ini menyebabkan tingginya nilai piutang di neraca dikarenakan perbedaan persentase penyisihan piutang. Selain itu pula pada kebijakan Direksi Perumda XYZ tidak menyertakan kualitas piutang dalam hal pembuatan kategori penyisihan piutang.

3. Belum adanya SOP mengenai kebijakan prosedur penagihan piutang sehingga tidak bisa menghapus piutang.
4. Tingkat perputaran piutang pada Tahun 2022 sebesar 136 hari dan dikategorikan lambat, dikarenakan untuk menjadikan piutang menjadi kas harus selama 136 hari.

Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Perusahaan harus melakukan *Good Corporate Governance* (GCG), menerapkan manajemen risiko (MR), Sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengendalian piutang.
2. Membuat kebijakan prosedur penerimaan kas, khususnya dalam hal pembayaran retribusi diharuskan diawal sehingga mengurangi potensi piutang.
3. Perumda XYZ membuat kebijakan prosedur penagihan piutang, agar dapat membuat kebijakan penghapusan piutang.
4. Perumda XYZ sebaiknya merubah kebijakan akuntansi dalam hal kualitas dan penyisihan piutang sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 sehingga nilai piutang dapat menurun.
5. Penyajian piutang pada neraca cukup piutang bersih, tetapi pada CALK dapat dijelaskan penyisihan piutangnya.
6. Pembayaran retribusi dapat dilihat pada website agar transparansi terhadap wajib retribusi dan masyarakat dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Z. (2004). *Intermediate Accounting* (8th ed.). BPFE Yogyakarta.

Demak, Y. K., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2018). *Analisis Piutang Tak*

Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada PT. Air Manado.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/21151/20861>

- Gabriel, E. (2023, November 21). *Allowance Method - Definition, Overview & Examples*.
<https://study.com/academy/lesson/uncollectable-accounts-the-allowance-method-bad-debt.html>
- Horngren, C. T., & Harrison, W. T. J. (2017). *Akuntansi Jilid 1*. Erlangga.
- IAI, I. A. I. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*.
- Peraturan Pemerintah. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017*.
- Permendagri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Negeri Indonesia Nomor 73 Tahun 2015*.
- Pramesti, N. C., Gusti, I., & Purnamawati, A. (2024). Analisis Piutang Usaha Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2).
- Purwanti, A., Rikah, Sutrisno, C. R., Sartika, D., Syahrenny, N., Mahmudah, D. A., Yani, P., Mulyani, S., Adriyana, R., Rois, D. I. N., Sari, I. A., Oktaviani, R. M., & Muchlis. (2024). *Sistem Akuntansi* (Luhgiatno, Ed.). Eureka Media Aksara.
<https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/567715-sistem-akuntansi-4c348ab8.pdf>
- Warren, Reeve, & Fees. (2005). *Accounting: Pengantar Akuntansi* (21st ed.). Salemba Empat.